



# SKRIPSI

**Judul:**

Tindak Pidana Korupsi dalam Kondisi Covid-19  
sebagai Alasan Pemberat bagi Koruptor

**Disusun oleh:**

ANASTASIA  
NIM. 205190179

PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS TARUMANAGARA  
2023

**TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM KONDISI  
COVID-19 SEBAGAI ALASAN PEMBERAT  
BAGI KORUPTOR**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

Oleh :

Nama : Anastasia  
NIM : 205190179

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS  
TARUMANAGARA JAKARTA, 2023**

## Pengesahan

Nama : ANASTASIA  
NIM : 205190179  
Program Studi : HUKUM  
Judul Skripsi : Tindak Pidana Korupsi Dalam Keadaan Tertentu Bencana Non-alam Sebagai Alasan Pemberat Bagi Koruptor  
Title : Corruption Crimes in Certain Circumstances Non-natural Disasters as Ballast Consideration for Corruptor

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Program Studi HUKUM Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara pada tanggal 19-Januari-2023.

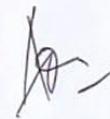
### Tim Penguji:

1. R. RAHADITYA, S.H., M.H., Dr.
2. ADE ADHARI, S.H., M.H.
3. RUGUN ROMAIDA HUTABARAT, S.H.,M.H.

Yang bersangkutan dinyatakan: **LULUS.**

### Pembimbing:

ADE ADHARI, S.H., M.H.  
NIK/NIP: 10216001



Jakarta, 19-Januari-2023

Ketua Program Studi



RUGUN ROMAIDA HUTABARAT, S.H.,M.H.

## Persetujuan

Nama : ANASTASIA  
NIM : 205190179  
Program Studi : HUKUM  
Judul : Tindak Pidana Korupsi Dalam Keadaan Tertentu Bencana Non-alam Sebagai Alasan Pemberat Bagi Koruptor

Skripsi ini disetujui untuk diuji

Jakarta, 13-Januari-2023

Pembimbing:  
ADE ADHARI, S.H., M.H.  
NIK/NIP: 10216001



## **KATA PENGANTAR**

Puji dan Syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya sehingga dapat terselesaikannya skripsi dengan judul “Tindak Pidana Korupsi Keadaan Tertentu Bencana Nonalam Sebagai Alasan Pemberat bagi Koruptor” dapat diselesaikan dengan baik. Penulisan skripsi ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara Jakarta. Disamping itu, sebagai mahasiswa hukum sudah menjadi kewajiban dan tuntutan bagi penulis untuk berpikir kristis dan solutif dalam menghadapi isu hukum yang hidup di tengah-tengah masyarakat.

Penulis pun menyadari bahwa proses penulisan skripsi ini banyak mengalami kendala dan tangangan namun berkat bantuan, bimbingan dan kerjasama dari berbagai pihak, berbagai hal tersebut dapat teratasi satu-persatu. Oleh karena itu, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada setiap orang yang sangat berperan dalam penyelesaian skripsi ini, kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
2. Rugun Romaida Hutabarat, S.H., M.H., selaku Kepala Program Studi Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
3. Christine S.T. Kansil, S. H., M.Hum., selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara
4. Ade Adhari, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing penulis atas kedermawanan beliau membagikan ilmu dan menyisihkan waktunya,

- bahkan pada waktu libur serta tidak lelah memberikan saran, kritik maupun arahan selama proses penulisan skripsi ini;
5. Orang tua dan saudara penulis yang sudah memberi dukungan selama penyusunan skripsi ini.
  6. Robi Hertanto selaku teman diskusi yang sudah memberi dukungan immateril serta mendorong penulis untuk mengelaborasi bahan hukum penulisan ini.
  7. Angel Victoria, Erlyns Yolanda, Rania Zalfa, Reyza Julianda, Ibnu Afif dan Grace Priskila selaku sahabat penulis yang senantiasa menemani penulis dalam setiap proses penulisan skripsi ini.
  8. Natazia, Dwi Cesario, Fauzia dan Timothy selaku teman bimbingan yang selalu membantu penulis dalam mengejar setoran revisi skripsi ini.
  9. Senior, Junior dan rekan Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Indonesia yang sudah membantu penulis dalam penulisan skripsi ini;
  10. Untuk semua teman-teman yang tidak dapat disebutkan satu persatu di sini.

Jakarta, 1 Februari 2023

Anastasia

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN.....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Permasalahan.....	7
C. Tujuan dan Kegiatan .....	7
D. Kerangka Konseptual .....	9
E. Metode Penelitian.....	19
F. Sistematika Penelitian .....	21
<b>BAB II KERANGKA TEORITIS.....</b>	<b>23</b>
A. Kebijakan Hukum Pidana ( <i>penal policy</i> ).....	23
B. Teori Pemberatan Hukum Pidana.....	26
C. Teori Penafsiran.....	27
D. Teori Pemidanaan.....	35
<b>BAB III DATA HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>39</b>
A. Norma Hukum Pidana Tentang Keadaan Tertentu dalam Undang Undang.....	39
B. Riwayat <i>Judicial Review</i> pada Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.....	41
<b>BAB IV ANALISIS PERMASALAHAN.....</b>	<b>45</b>
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>73</b>
A. Kesimpulan .....	73
B. Saran.....	74
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>75</b>

## ABSTRAK

- (A) Nama : Anastasia: NIM: 205190179  
(B) Judul : Tindak Pidana Korupsi dalam Kondisi Covid-19 sebagai Alasan Pemberat bagi Koruptor  
(C) Halaman : vii + 83 Halaman (2023)  
(D) Isi :

Fenomena korupsi merupakan suatu bentuk kebijakan nyata dalam praktek kenegaraan di Indonesia. Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan pada saat bencana non-alam terhadap dana-dana penanggulangannya, yang mana tidak termasuk ke dalam frasa “keadaan tertentu” menjadi suatu ketidakpastian yang dapat melemahkan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi yang terjadi. Dengan terjadinya fenomena tersebut, harapan dari diberikannya pemidanaan yang dikombinasi adalah untuk memberikan efek jera. Namun, sangat disayangkan pada realitanya, masih terdapat sejumlah terdakwa yang dikenakan hukuman relatif ringan oleh Jaksa, serta KPK sebagai penuntut belum maksimal dalam melakukan penuntutan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bencana Covid-19 dapat dimaknai keadaan tertentu di dalam Pasal 2 ayat 2 Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif yang bersifat deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa bencana nonalam seperti Covid-19 dapat termasuk ke dalam keadaan tertentu apabila dilakukan penafsiran melalui latar belakang dan tujuan perumusannya. Dengan adanya ancaman sanksi yang lebih berat merupakan bentuk keseriusan akibat dan nilai ketercelaan jika tindak pidana korupsi tersebut dilakukan dalam keadaan tertentu.

**Kata kunci: Korupsi, Keadaan Tertentu, Bencana Nonalam**

- (E) Daftar Acuan : Buku 15, Undang-Undang 6, Jurnal 11.  
(F) Pembimbing : Ade Adhari, S.H., M.H.  
(G) Penulis : Anastasia

## **DAFTAR SINGKATAN**

- APBN adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
- COVID-19 adalah Corona Virus Diseases 2019
- KPK adalah Komisi Pemberantasan Korupsi
- DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat
- HAM adalah Hak Asasi Manusia
- KBBI adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia
- KUHP adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- MA adalah Mahkamah Agung
- MK adalah Mahkamah Konstitusi
- PP adalah Peraturan Pemerintah
- RI adalah Republik Indonesia
- KLB adalah Kejadian Luar Biasa
- OTT adalah Operasi Tangkap Tangan
- WHO adalah *World Health Organization*